

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Oleh :

¹Satria Paris Heremba; ²Suryadi Lambali; ³Hasniati

¹²³ Pasca Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Hasanuddin

Email: satriaph13@gmail.com

Abstrak

Pembangunan merupakan perang untuk melawan kemiskinan, aspek penting pada pembangunan tidak hanya mengfokuskan pada hasil akhir suatu pembangunan yang dicapai, tetapi harus bisa menggerakkan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan. Tujuan penelitian kajian penelitian ini yakni untuk menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung di Distrik Ngguti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, sementara teknik analisis data menggunakan metode interaktif yakni penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat di wilayah kerja pemerintahan Distrik Ngguti dalam proses perencanaan pembangunan kampung belum optimal. Ketidakefektifan ini terjadi karena kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi skala prioritas pembangunan masih rendah, dan ketidakpuasan masyarakat kampung terhadap pemerintah karena apa yang mereka usulkan tidak pernah terealisasi yang mengakibatkan masyarakat sedikit apatis terhadap proses pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan rasa partisipasi masyarakat yakni kemampuan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memberikan daya dan semangat bagi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan, dan keberanian dan komitmen pemerintah untuk menjelaskan alasan program yang diusulkan tidak dapat direalisasi untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Partisipasi; Perencanaan; Pembangunan

Abstarac

Development is a war against poverty, an important aspect of development not only focuses on the final results of a development achieved, but must be able to drive community involvement to participate in every stage of development. The purpose of this research study is to analyze community participation in planning village development in Ngguti District. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach, data collection techniques in the form of observation and interviews, as well as data analysis techniques using interactive methods, namely data presentation, data reduction, and conclusion drawing. The results of the study showed that community participation in the Ngguti District government work area in the village development planning process was not optimal. This ineffectiveness occurs because the community's ability to identify needs to be a scale of development priorities is still low, and the dissatisfaction of the village community towards the government because what they propose has never been realized which results in the community being a little apathetic to the development process carried out. Therefore, efforts that need to be made to increase the sense of community participation are that the ability of the community needs to be improved to provide power and enthusiasm for the community to be able to identify needs, and the courage and commitment of the government to explain the reasons why the proposed program cannot be realized to build a sense of public trust in the government.

Keywords: Participation; Planning; Development

PENDAHULUAN

Perencanaan dalam pembangunan bukan menjadi penentu keberhasilan suatu pembangunan, namun perencanaan merupakan langkah awal yang ditempuh untuk proses pembangunan karena keberhasilan suatu pembangunan merupakan sinergisitas hubungan antar proses pembangunan baik perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan pemanfaatan hasil akhir pembangunan. Pembangunan yang dapat memberikan nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat banyak jika proses pembangunan diawali dengan mekanisme perencanaan yang matang dengan melibatkan setiap unsur dalam aktifitas pembangunan.

Secara konseptual perencanaan dan pembangunan memiliki hubungan secara definisi diaman perencanaan sebagai proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang, Conyer dan Hill (Tarigan, 2012). Pembangunan secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Di sisi lain pembangunan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara terarah, terencana serta berkesinambungan untuk menuju pada suatu perubahan. Jika disandingkan dari kedua definisi kosep tersebut maka perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkesinambungan yang didasari pada pilihan keputusan dari berbagai alternatif untuk menuju pada perubahan hidup masyarakat di masa yang datang.

Santy Sriharyati dan Lulu Ulfa Sholihannisa, (2020) bahwa perencanaan pembangunan dilakukan untuk menentukan skala prioritas pembangunan dan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menciptakan kesejahteraan sosial, dirancang oleh pemerintah dan seluruh tingkatannya serta dengan melibatkan seluruh komponen bangsa (stakeholder). Pernyataan ini secara implisit mengedepankan pentingnya pembangunan berdasarkan kebutuhan, pemerataan pembangunan, sinkronisasi dan sinergi serta penguatan koordinasi dalam proses pembangunan, termasuk tahap perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi utama pelaksana perencanaan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota perlu senantiasa memperkuat koordinasi guna menciptakan sinergi dan sinkronisasi perencanaan yang berdasar kepada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya.

Proses perencanaan pembangunan yang efektif tidak hanya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, akan tetapi pembangunan harus menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikutsertakan dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Adapun partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta tindak lanjut dan pemeliharannya, Herman (2019). Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua

stakeholder yang berperan utama dan sejajar yaitu pemerintah dan masyarakat, Korten, (Herman, 2009)

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif merupakan sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan, Firyal Akbar, Srihandayani Suprpto, Surati (2018)

Menurut Cohen dan Hoff (Dwiningrum, 2009), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Distrik Ngguti Kabupaten Merauke, terutama proses perencanaan pembangunan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang berbunyi: Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat kampung, musrenbang tingkat distrik, musrenbang tingkat kabupaten.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai musrenbang kampung sampai distrik belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Selain itu adanya tingkat kehadiran stakeholders penting dalam perencanaan pembangunan seperti tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda relatif rendah, serta tingkat keaktifan peserta relatif rendah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta muskam bahwa kehadiran peserta dalam muskam tersebut semata-

mata hanya memenuhi undangan, sehingga kehadirannya lebih banyak sebagai pendengar. Ada beberapa tokoh masyarakat yang diundang muskam tidak bisa hadir dan mewakilkannya pada orang lain yang kurang memahami perencanaan pembangunan. Sehingga mereka tidak mengajukan usulan, tidak memberikan masukan dan juga tidak mengidentifikasi kebutuhan dalam perencanaan. Mereka terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala kampung untuk merumuskan perencanaan pembangunan. Waktu bagi penyelenggaraan muskam sangat pendek, sehingga sulit untuk mendorong partisipasi masyarakat. Masalah waktu menjadi kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat bersifat pasif dapat terlihat posisi masyarakat yang hadir sering kali hanya mendengarkan, tidak turut berpartisipasi aktif, pengajuan program seringkali hanya berupa pengulangan. Dan hanya disampaikan langsung oleh kepala kampung, ada semacam sikap apatis dari masyarakat kepada pemerintah daerah karena program yang diajukan pada waktu sebelumnya tidak direspon. Masalah lain adalah masyarakat lebih banyak mendengar dan mengiyakan. Selain itu kekecewaan karena partisipasi kurang mendapat respon. Kondisi masyarakat yang cenderung pasif dalam proses perencanaan pembangunan akan berdampak pada nilai kesenjangan pendapat antara masyarakat dengan pemerintah.

Hal ini senada dengan pendapat dari Herman (2009) mengatakan kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah hal tersebut berakibat rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena tanpa disadari sebenarnya peran pemerintah sendiri masih lebih besar, meskipun tidak secara fisik akan tetapi dalam wujud regulasi yang kurang memberikan keluasaan bagi masyarakat secara optimal. Berdasarkan pada permasalahan yang sudah diuraikan di atas maka kajian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung di Distrik Ngguti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif guna mendeskripsikan fenomena di lapangan secara menyeluruh mengenai kajian penelitian. ini yakni fenomena partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di distrik Ngguti.. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Informan pada penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interaktif model of analysis*) sesuai teori Miles et al. (2014) yaitu dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengutip pendapat dari Angelius Henry Sigalingging (2014) bahwa keberhasilan pembangunan tersebut maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya serta mereka juga yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Dalam hubungan penelitian ini ingin menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kerja pemerintah Distrik Ngguti Kabupaten Merauke, dengan menggunakan empat indikator yang telitia adalah sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Mengutip pendapat dari Muhammad Ikbal dan Abdul Jabbar (2019) menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting. Masyarakatlah yang mengetahui sendiri tentang apa yang dibutuhkan dan menjadi kepentingan dalam hidupnya, dengan demikian maka ia sangat berhak untuk menentukan tindakantindakan yang perlu dilakukannya dalam rangka pemenuhan dari segala kebutuhannya. Sedangkan orang lain dalam hal ini berarti juga negara hanyalah sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk memenuhi akan kebutuhannya tersebut. Sehingga masyarakat betul betul mandiri tanpa lagi tergantung kepada pemerintah.

Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka. Pendapat ini ,menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemngambilan keputusan dalam suatu aktifitas perencanaan pembangunan merupakan suatu keadaan yang menunjukan

Hasil penelitian tentang indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Proses perencanaan selama ini dimulai dari tingkat paling bawah yaitu tingkat Kampung. yang disebut Musrenbang kampung. selanjutnya hasil musrenbang kampung akan dibawah oleh masing-masing kampung untuk di musyawarah dalam tingkat distrik. Hasil musyawarah tingkat distrik tersebut itulah yang menjadi usulan tingkat distrik yang akan dibawah dalam musrenbang tingkat distrik untuk melihat kesesuaian dengan perencanaan yang ada ditingkat OPD. sesuai dengan prioritas daerah dalam tahun perencanaan yang tentunya kembali untuk mendukung capaian visi misi dalam RPJMD. Hal ini menunjukan bahwa ada serangkain tindakan yang menjadi mekanime dalam pilihan pengambilan suatu keputusan, akan tetapi keputusan yang diambil harus memeprtimbangkan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat. dalam proses pembangunan terdapat dua paradigma yaitu, paradigma *top down* dan *bottom up*, Cohen dan Uphoff (Kalesaran et al., 2015). Salah satu penentu keberhasilan dalam proses pembangunan yaitu jenis pendekatan yang dipilih antara *top down* ataupun *bottom up*. Model *top down* seringkali digunakan oleh negara-negara berkembang. Pendekatan *bottom up* dibangun atas berdasarkan pengelolaan sumber daya manusia. Persoalan ataupun aspirasi masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang akan diambil David Korten (Dunn, 2016). Masyarakat memiliki peranan dalam setiap pembangunan untuk mengusulkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya dengan begitu masyarakat ikut serta disetiap program-program pembangunan, Supeno (Sombang, 2020).

Pengambilan keputusan yang bersifat mufakat mencerminkan sikap orang yang berpartisipasi mengedepankan aspek kebersamaan dan mendudukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Ini mencerminkan sikap kedewasaan masyarakat Distrik Ngguti. Sebelum masyarakat menentukan keputusan mereka, masyarakat terlebih dahulu berdiskusi lalu menempatkan keputusan berdasarkan angka-angka, jadi jika angka itu dimulai dari satu maka itulah menjadi prioritas utama, dan bisa jadi semua yang mereka usulkan tidak terlepas dari infrastruktur mengingat permasalahan utama yang dihadapi adalah infrastruktur terutama jalan.

Herman (2019) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan lebih menekankan pengambilan keputusan secara sadar oleh masyarakat atas pilihan-pilihan yang tersedia. Keseluruhan tahapan kegiatan perencanaan pembangunan desa merupakan rangkaian kegiatan untuk membangun dukungan dan kepercayaan kepada masyarakat; membangun relasi yang luas dan kuat dengan masyarakat, mempersiapkan kader-kader lokal dan sebagai upaya membangkitkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kerjasama masyarakat.

Hal senada juga dipertegas dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan

Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena dalam perencanaan pembangunan, masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Sebagai akibat dari kurang aktifnya atau masyarakat kurang percaya

diri (berbisik kepada kepala kampung) yang menyebabkan kepala kampung yang menjadi penyambung lidah masyarakat dikampung-kampung. Akan tetapi secara umum tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat tinggi ditingkat distrik maupun kampung masyarakat sangat antusias dan beramai-ramai menghadiri acara Musrenbang yang kami adakan di kantor kecamatan sekalipun jarak mereka jauh akan tetapi karena kesadaran akan pentingnya kehadiran mereka dalam menentukan nasib pembangunan distrik Ngguti sehingga mereka hadir.

Sementara dalam hubungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdapat alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting, yaitu: 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek itu. Adanya suatu anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang distrik merupakan rumusan elite kampung, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Kampung menyiapkan daftar identifikasi kebutuhan masyarakat di kantor kampung sebelum penyelenggaraan muskam. Pada tahap muskam, aparat kampung membacakan daftar identifikasi kebutuhan kampung, namun tidak mendiskusikan kebutuhan mana yang dijadikan kegiatan prioritas yang akan diusulkan pada musrenbang tahapan selanjutnya pihak kampunglah yang merumuskan daftar kegiatan prioritas tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah kampung masih mendominasi perumusan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang selanjutnya. Begitu pun dalam musrenbang distrik, berdasarkan hasil pengamatan ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kabupaten merupakan rumusan elite distrik berdasarkan daftar usulan dari masing-masing desa dan dinas/instansi. Hal ini dapat dilihat ketika proses musrenbang distrik tidak ada acara penentuan prioritas kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam forum musrenbang, karena daftar usulan kegiatan sebagai hasil musrenbang distrik yang akan diusulkan ke kabupaten sudah di printout oleh pihak distrik.

Hal ini akan bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiasi masyarakat, hak asal usul atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konseptual dipertegas oleh Oklian Madila; Welly Waworundeng; Alfon Kimbal (2019) bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang terdapat kekuasaan Government dan Non Government, tetap saja sedikit kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kedua kelompok kepentingan

tersebut untuk mengintervensi keputusan musrenbang, hal ini dikarenakan dua kelompok kepentingan tersebut sama-sama meyakini bahwa walaupun mereka tergolong elite mereka tetaplah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut gagasan, mereka hanya sebatas memberikan ide, dan tidak melakukan intervensi bahwa ide tersebut harus dilakukan. Triana Winni Astuty (2015) menegaskan bahwa dalam rangka mengatur urusan kepentingan masyarakat setempat tersebut, desa memerlukan pemimpin untuk memimpin jalannya pemerintahan desa. Pemimpin yang dimaksud dalam hal ini adalah elit, yaitu orang-orang yang menduduki kekuasaan dalam pemerintahan dan kedudukan dominasi dalam masyarakat.

Ada yang unik dalam pelaksanaan musrenbang di Distrik Ngguti dimana masyarakat jika ingin diundang dalam menghadiri pelaksanaan perencanaan pembangunan maka jauh-jauh hari sebelumnya Hansip Kampung Bersama aparat distrik itu pergi membawa undangan masyarakat kekampung-kampung wilayah, letak uniknya adalah dimana masyarakat itu jauh meninggalkan rumah dan berburu kehutan, karena memang sumber makanan mereka masih ada yang Bertani didalam hutan serta berburu hewan, jadi Hansip dan aparat Distrik juga masuk kedalam hutan selama sehari-hari hanya untuk memberi masyarakat undangan agar hadir dalam pelaksanaan musrenbang. Tidak hanya itu jalan untuk masuk kedalam tidak kalah ekstrem karena akses hanya bisa menggunakan mobil dan untuk kategori motor hanya motor tipe Trail yang bisa masuk mengingat tanah merah dan hutan lembab yang menjadikan jalan sepanjang perjalanan kekampung menjadi berlumpur.

Dalam konteks pembangunan peran partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek. Selanjutnya partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.

Menurut Adisasmita (2006), keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) suatu program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal, dimaknai sebagai partisipasi masyarakat. Partisipasi ini merupakan salah satu bentuk Pemberdayaan Masyarakat (*social empowerment*) dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan mereka tinggal, baik dari aspek masukan (*input*), aspek proses dan aspek keluaran (*output*). Dengan melibatkan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan, dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Sehingga peningkatan partisipasi masyarakat juga memerlukan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

kebijakan di daerah maka berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan keyakinan mereka tentang manfaat partisipasi terhadap perbaikan kehidupannya dan memperkecil risiko ketika mereka terlibat dalam proses kebijakan.

Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan proses perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan yang partisipatif khususnya pembangunan ditingkat daerah dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat. Bagi pemerintah nilai manfaat yang didapatkan dengan perencanaan yang berpartisipatif dapat menjaring dan juga menyaring informasi yang secara langsung dari masyarakat sehingga membantu pemerintah dalam menentukan pilhan kebijakan pembangunan yang ada di daerah. Sedangkan bagi masyarakat manfaat yang didapatkan dari perencanaan pembangunan yang paratisipatif sebagai akses bagi masyarakat untuk mengakutualisasi diri dalam memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, ide-ide serta usulan pendapat yang didasari pada kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijawab melalui pembangunan.

Hasil penelitian dari indikator partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan proses perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa nilai manfaat yang diterima bagi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang ada wilayah kerja di Distrik Ngguti adalah dimana masyarakat secara terbuka memberikan ide-ide, serta usulan yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Pemerintah Distrik Ngguti sebagai gagasan pemeikiran dalam menentukan perencanaan pembangunan yang datang, Manfaat lain yang diterima adalah setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh waktu dan tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan dalam proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

Ada kecenderungan rasa pesimisme yang dapat menimbulkan apatisisme dalam diri masyarakat yang ada di Distrik Ngguti tentang keraguan masyarakat yang beranggapan bahwa tidak semua yang diusulkan diterima termasuk usulan yang menjadi skala kebutuhan yang mendasar yang di alami oleh masyarakat di Distrik Ngguti. Secara usulan semua masyarakat hanya berfokus pada kualitas pembangunan infrastruktur karena mereka sudah lama tidak memiliki akses jalan yang layak, akan tetapi tidak semua infrastruktur yang mereka usulkan terlaksana, ada yang malahan sudah tiga kali diusulkan oleh warga akan tetapi tidak terlaksana, hal ini bisa menimbulkan apatisisme masyarakat dan ketidakpercayaan akan agenda perencanaan pembangunan yang dilaksanakan. Senada dengan pendapat dari Herman (2019) bahwa sikap apatisisme masyarakat yang lebih disebabkan oleh banyak hasil-hasil perencanaan pembangunan yang dalam implementasi tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat seperti: hasil-hasil pembangunan di setiap sektor-sektor pembangunan.

Senada juga dipertegaskan oleh Hubertus Oja dan Hesty Tambajong (2015) bahwa Penerapan model pelaksanaan dengan melibatkan masyarakat secara langsung memberikan peluang yang sama kepada masyarakat karena masyarakat bukan lagi

dipandang sebagai objek dari sebuah pembangunan namun masyarakat juga sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks pembangunan yang demokrasi selalu penekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, artinya sebuah paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat/rakyat sebagai pusat pembangunan (*people centry development*) bukan menjadikan masyarakat hanya sebagai penikanti akhir dari hasil sebuah pembangunan.

Kedudukan masyarakat perencanaan pembanguan memiliki fungsi penting, diantaranya adalah sebagai sarana bagi warga untuk mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses kebijakan pembanguan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhandan kepentingan warga. Lebih dari itu, partisipasi masyarakat penting untuk menjamin warga masyarakat dapat menciptakan kepedulian dan dukungan warga untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.Partisipasi juga dapat digunakan melakukan pendidikan dan pembelajaran bagi warga terhadap masalah dan kebijakan publik.Partisipasi karenanya dapat membentuk *sense of citizenship* yang sangat penting bagi pengembangan demokrasi dan pembangunan bangsa. Dalam setiap pembangunan, keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan, tidak saja sebagai wujud pelaksanaan demokrasi tetapi agar hasil pembangunan yang dihasilkan tepat sasaran dan optimal bagi masyarakat.

Menurut Davis dan Newstorm (Remiswal, 2013) mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental atau emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab untuk mencapainya. Sedangkan Remiswal (2013) berpendapat bahwa partisipasi adalah kesediaan masyarakat secara suka rela untuk membantu kelangsungan program-program pemerintah yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang di kembang baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil perencanaan pembangunan

Santy Sriharyati dan Lulu Ulfa Sholihannisa (2020) menegaskan bahwa Evaluasi dapat menyediakan informasi yang kredibel dan berguna, dan juga menghasilkan feedback yang dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan yang akan datang. Perencanaan yang dikombinasi dengan monitoring dan evaluasi dapat berperan penting dalam peningkatan efektifitas rogram dan kegiatan pembangunan. Perencanaan membantu untuk fokus pada hasil, sedangkan monitoring dan evaluasi membantu untuk mempelajari kesuksesan dan tantangan di masa lampau dan memberikan informasi untuk pembuatan keputusan sehingga periode saat ini dan masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Dengan demikian antara perencanaan, monitoring,dan evaluasi memiliki keterkaitan dan membentuk suatu siklus.

Hasil penelitian tentang indikator evaluasi perencanaan pembangunan di Distrik Ngguti bahwa proses evaluasi program perencanaan memang kabupaten Merauke

sudah sangat selektif dalam hal evaluasi akan tetapi desakan dari masyarakat terkait teknis didalam pemerintahan mereka tidak mau tau sehingga mereka merasa apa yang mereka aspirasikan dalam partisipasi perencanaan pembangunan terbuang sia-sia. Masalah lainnya adalah banyak yang diusulkan oleh masyarakat akan tetapi lain juga yang dikerjakan oleh pemerintah yang menyebabkan masyarakat tiap ada Musrenbang mempertanyakan kenapa tidak dikerjakan bahwa perlu kejujuran pemerintah dalam hal pembangunan, Secara keseluruhan program yang diusulkan masyarakat hanya terealisasi sekitar 30% sampai 40% karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah sendiri.

Terbatasnya anggaran menjadi satu kendala sendiri sehingga masyarakat merasa tidak puas, memang anggaran yang menjadi keterbatasan karena tuntutan masyarakat itu bersifat infrastruktur, pembangunan dimerauke itu cukup mahal karena akses untuk kedistrik itu sangat jauh. Hal ini yang menyebabkan bahwa pelaksanaan program Musrenbang memang rendah akan tetapi antusias masyarakat untuk hadir sangat tinggi yang menyebabkan semakin banyak juga tuntutan atau aspirasi yang dikemukakan mengakibatkan banyak yang tidak terealisasi.. Hal ini senada dengan pendapat dari Santy Sriharyati dan Lulu Ulfa Sholihannisa (2020) bahwa tujuan dengan adanya evaluasi adalah memberikan masukan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan program, kebijakan, dan strategi, serta ditujukan pula untuk akuntabilitas dan transparansi, sedangkan tujuan khusus dari evaluasi adalah untuk menentukan kerelevansian obyek, efisiensi, dan efektifitas terhadap pencapaian obyek, dan mengukur dampak dan keberlanjutan dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan.

Peneliti juga selama berdiskusi dengan beberapa narasumber mengatakan bahwa pemerintah selalu memberikan harapan palsu jika bertemu dengan masyarakat mereka jika dilokasi dan ditanyakan tentang pembangunan selalu mengatakan kami akan proses secepat mungkin akan tetapi sudah bertahun-tahun belum terealisasi inilah yang membuat juga ada Sebagian masyarakat yang jenuh dengan janji-janji dari pemerintah karena mereka merasa terkhianati karena semua yang diusulkan hanya segelintir saja yang disetujui, belum lagi masalah lain yang diusulkan lain juga yang dikerjakan yang menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan ada juga beberapa yang bersifat masa bodoh.

Hal ini karena program masyarakat tidak direspon, Sikap apatis dan tidak menganggap penting, pola pelaksanaan musrenbang yang sangat formal dan bukan dengan “bahasa” masyarakat. Pola dan gaya rapat atau musyawarah yang berbasis pada sistem nilai lokal kurang diperhatikan. hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mempercayakan hasil perencanaan pembangunan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan, dan masyarakat menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat. Senada dengan pendapat dari Herman (2019) bahwa sikap apatisisme masyarakat yang lebih disebabkan oleh

banyak hasil-hasil perencanaan pembangunan yang dalam implementasi tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat seperti: hasil-hasil pembangunan di setiap sektor-sektor pembangunan.

KESIMPULAN

Kebijakan yang bersifat bottom-up memang sangat tepat terutama untuk masyarakat di Distrik Ngguti akan tetapi tetap menyimpan beberapa masalah yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung. Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di wilayah kerja pemerintahan Distrik Ngguti dalam proses perencanaan pembangunan kampung belum optimal. Ketidakoptimalan ini terjadi karena kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi skala prioritas pembangunan masih rendah, dan ketidakpuasan masyarakat kampung terhadap pemerintah karena apa yang usulkan tidak pernah terealisasi yang mengakibatkan masyarakat sedikit apatis terhadap proses pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan rasa partisipasi masyarakat yakni kemampuan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memberikan daya dan semangat bagi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan, dan keberanian dan komitmen pemerintah untuk menjelaskan alasan program yang diusulkan tidak dapat direalisasikan untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yakni: Perlu ada pola kebijakan pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai sentral dalam suatu perencanaan pembangunan, Setiap pilihan keputusan yang diambil dari hasil perencanaan mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat umum yang bersifat mendasar, setiap program pembangunan yang akan dijalankan harus diverifikasi terlebih dahulu terkait dengan ketepatan sasaran dari program tersebut, harus ada komitmen dan keberanian dari pemerintah untuk lebih transparan kepada masyarakat tentang program pembangunan yang akan dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelius Henry Sigalingging (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi) . Jurnal Administrasi Publik Volume 2 No 2 Tahun 2014
- Adisasmita, Rahardjo. 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan,. Y ogyakarta: Graha Ilmu.
- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita
- Dunn, W. N. (2016). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (II). Gadjah Mada University Press.

- Herman (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene . Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1 Tahun 2019
- Hubertus Oja Dan Hesty Tambajong (2015). Strategi Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) Dalam Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Marga Mulia Distrik Semangga. Societas: Jurna Administarsi dan Sosial, Volume 4 No 2 Tahun 2015
- Irene Astuti Dwiningrum (2011), Desentralisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan; Suatu Kajian Teoretis Empirik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kalesaran, F., Randung, V. V., & Pioh, N. R. (2015). Partisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado. Journal Acta Diurna Volume 6 No 4 Tahun 2011
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE.
- Muh. Firyal Akbar, Srihandayani Suprpto, Surati, (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. Publik Jurnal Administarsi. Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018
- Muhammad Ikbali, Abdul Jabbar (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Wedana Volume 5 No 1 Tahun 2019
- Oklian Madila; Welly Waworundeng; Alfon Kimbal. (2019). Koordinasi Elite Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019
- Remiswal (2013). Menggugah Partisipasi Gender Dilingkungan Komunitas. Yogyakarta: Graha ilmu
- Sombang, N. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No 1 Tahun 2020
- Santy Sriharyati dan Lulu Ulfa Sholihannisa, (2020). Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan Menggunakan Analytic Hierarchy Procces (AHP). ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis Volume. 6 No. 1 Tahun 2020
- Tarigan, Robinson. 2012. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Triana Winni Astuty (2015). Pengaruh Elit Berkuasa terhadap Pembangunan Desa. Jurnal Studi Pustaka. Volume 2, No 3 Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa